

1st article:

Dunia Kekurangan Energi 2030

Menyalakan lampu akan menjadi sulit di tahun 2030 nanti, seiring ancaman krisis energi yang melanda dunia. Analisa International Energy Agency (IEA) menyatakan peningkatan ekonomi negara-negara berkembang berpadu kebutuhan energi negara-negara industri yang terus beranjak naik 45% dari kebutuhan saat ini, yang berarti akan menghantar dunia kembali ke masa batu.

Sedikitnya dunia harus membangun 20 pembangkit listrik tenaga nuklir, 20 pembangkit tenaga air, 3000 pembangkit matahari dan 30 pembangkit tenaga batubara dalam 20 tahun kedepan agar penduduk dunia masih bisa menikmati listrik di malam hari. Kebutuhan ini juga berarti kabar buruk bagi bumi sendiri. Dari semua pembangkit listrik ini diperkirakan emisi karbon bumi akan naik 97% dalam 20 tahun kedepan hanya dari negara ekonomi berkembang seperti China dan India saja.

“Skenario ini tidak hanya akan membahayakan kebutuhan energi dunia, tapi juga akan berdampak buruk pada lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata Richard Bradley Kepala tim efisiensi energi IEA. Menurutnya dunia harus melakukan efisiensi energi hingga menurunkan total karbon global pada tingkat 450 ppm pasca 2012.

“Dan pemotongan emisi karbon ini tak bisa hanya dilakukan negara-negara industri saja, tapi juga harus melibatkan negara-negara ekonomi berkembang seperti China, India, Brazil atau Indonesia,” kata Bradley.

Dengan patokan target 450 ppm pun suhu bumi 20 tahun ke depan masih akan meningkat hingga 2 derajat celsius. Permintaan energi global akan terus meningkat, sekalipun hanya separuh dari kebutuhan tanpa kebijakan efisiensi energi. Kabar baik akan terlihat dari penurunan kadar emisi besar-besaran di negara-negara ekonomi berkembang, berimbang dengan memantapnya pasar karbon dunia dengan harga US\$ 180 per ton. Namun di lain pihak, untuk efisiensi energi negara-negara sedikitnya memerlukan investasi tambahan sekitar 0,6% dari Gross Domestic Product (GDP) mereka.

“Masalahnya sekarang banyak negara-negara dunia yang tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya, hingga pembangkit listrik batubara tetap menjadi pilihan utama,” kata Helen Mountford, analis OECD, badan analisa kerugian GDP akibat pemotongan karbon internasional.

Kontroversi juga menanti di balik pilihan-pilihan pembangkit listrik yang efisien energi ini sendiri. Nuklir sampai saat ini mendapat tentangan keras dari berbagai kelompok pro lingkungan, akibat belum bisa menyelesaikan masalah limbah radiasinya. IEA sendiri akhirnya mengakui, alternatif pembangkit tenaga nuklir saat ini lebih cocok digunakan di Asia, daripada Eropa, mengingat kerasnya gerakan hijau di benua itu yang terus menentang dampak negatif nuklir. Sementara pembangkit listrik tenaga air juga mulai menimbulkan masalah sosial, saat pemerintah membendung sungai yang tadinya mengairi sawah-sawah penduduk.

“Alternatifnya memang mengembangkan energi terbarukan, namun saya khawatir teknologi ini tidak akan mampu menjawab kebutuhan energi global dalam waktu dekat ini,” kata Mountford, mengacu pada kenyataan energi terbarukan seperti matahari, panas bumi atau angin masih membutuhkan investasi teknologi yang mahal.

Namun tetap saja, dunia tak bisa tidak harus berhemat energi. IEA menemukan fakta jika semua

penduduk bumi mencabut alat-alat elektronik mereka setelah dipakai, maka akan terjadi penghematan energi hingga 40% secara global. Sementara pemerintah negara-negara industri maupun berkembang pun harus mulai menerapkan kebijakan energi ramah lingkungan dengan memadukan energi-energi terbarukan. Jika tidak, emisi karbon bumi akan terus meningkat 70% pada 2050 nanti.

“Memang tidak ada peluru perak yang dapat menyelesaikan masalah energi ini. Tapi era dimana minyak murah sudah berakhir dan kita harus memperbaiki dampaknya saat ini,” kata Bradley, mengacu pada era revolusi industri abad 19 saat dunia mengalami lonjakan emisi karbon yang tinggi akibat murahnya minyak bumi.

Menurutnya negara-negara juga tak bisa lagi egois berusaha mengembangkan teknologi energi terbarukan hanya untuk dijual ke negara lain. “Antar negara harus mulai bekerjasama mengembangkan teknologi energi terbarukan bersama sejak semula, agar pada akhirnya teknologi tersebut bisa lebih murah dan dapat bermanfaat bagi banyak orang,” kata Bradley.

Published in Jurnal Nasional, international page

2nd Article:

Berebut Dana Bunglon

Seekor bunglon dapat mudah beradaptasi mengganti-ganti warna kulit seenaknya. Namun negara-negara dunia tak bernasib sama. Program adaptasi perubahan iklim global diperkirakan akan menelan biaya milyaran dolar hingga akhirnya memancing perseteruan di antara negara-negara berkembang.

Tahun lalu konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Bali telah berunding alot demi memutuskan sistem pendanaan adaptasi internasional. Negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok Annex I dimintai tanggung jawabnya untuk mengucurkan dana ke kantong adaptasi PBB, karena telah mengotori bumi sejak revolusi industri dimulai abad 19 lalu. Dana ini akan ditampung lewat organisasi GEF...lalu disalurkan bagi negara-negara yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim.

Tak pelak sekitar 150 negara berkembang langsung mengantri minta bagian. Sementara negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok Annex I justru enggan mengucurkan dana adaptasi mereka. Di ajang konferensi perubahan iklim di Poznan, Polandia akhir tahun ini, satu-satunya negara donor adaptasi yang berani menyatakan komitmen nyata hanyalah Swedia, yang menawarkan kucuran dana pertama sejumlah US\$ 500 ribu. Negosiasi internasional juga tambah rumit saat anggota Annex I lainnya malah pilih-pilih dengan terus meminta pembaharuan kategori negara rentan perubahan iklim.

“Mereka (Annex I) membuat mekanisme (pendanaan adaptasi global) jadi rumit dengan meminta berbagai kriteria untuk menentukan negara-negara mana yang berhak dapat bagian,” kata Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.

Tak ada gading yang tak retak. Kriteria Bali Road Map akan negara yang rentan perubahan iklim justru menjadi senjata makan tuan. Dicantumkannya kategori negara pulau kecil membuat Singapura ikut mengantri minta bagian, sekalipun negeri selat Malaka ini sebenarnya termasuk negara maju. Dunia

tercengang ketika akhirnya negara kaya minyak Arab Saudi juga ikut mendaftar, atas nama ancaman dehidrasi di negaranya. Pertarungan makin ramai saat negara-negara Amerika Selatan seperti Meksiko dan Brazil ikut minta bagian. Indonesia sendiri termasuk pemain lama berebut dana bunglon dengan mengandalkan kategori negara dengan garis pantai yang panjang, negara kepulauan serta negara hutan hujan tropis.

Ribut-ribut dana bunglon pun mendominasi pertemuan lanjutan di Poznan, Polandia akhir tahun ini. Negara-negara yang tidak termasuk negara kepulauan kecil atau negara tertinggal, ngotot dirinya berhak mendapat dana adaptasi. Sekalipun besaran dana itu sendiri belum diketahui pasti, akibat masih belum jelasnya harga jual karbon secara global yang akhirnya akan memenuhi kecek adaptasi dunia. Meski sekarang negara-negara rebutan dana adaptasi, Sekretaris Jenderal UNFCCC Yvo de Boer menyatakan kriteria negara rentan perubahan iklim dalam Bali Road Map sama sekali tidak akan diutak-atik.

“Tidak akan ada rencana merevisi kriteria tersebut. Sekarang yang masih belum disepakati hanyalah bagaimana mekanisme pemberian dana itu nantinya,” tegas de Boer.

Kaburnya dana bunglon ini bukan hanya terjadi di tingkat internasional. Di lingkup negara sendiri pun mekanisme penyaluran dana hingga ke tingkat daerah masih mentah. Ketua Perubahan Iklim untuk Dewan Perwakilan Daerah Sarwo Edi menyatakan hingga kini mereka masih menggodok undang-undang jasa lingkungan, yang salah satunya akan mengatur mekanisme penyaluran dana adaptasi, kriteria daerah yang berhak mendapatkan serta sistem pengawasan penggunaan dana.

“Sampai sekarang kita masih belum tahu bagaimana mekanismenya nanti,” kata Sarwo Edi. Menurutnya DPD akan menuntaskan rancangan undang-undang ini sebelum konferensi puncak perubahan iklim dunia dilangsungkan di Kopenhagen, Denmark tahun depan, saat dunia memutuskan siapa-siapa saja yang berhak menikmati sepotong kue dana adaptasi. “Agar negara-negara donor tak khawatir dananya disalahgunakan,” kata Sarwo Edi, berusaha menjawab kekhawatiran kelompok Annex I kemungkinan korupsi dana bunglon.